

Kepentingan Pemerintah dalam Rotasi Jabatan Studi pada Masa Pemerintahan Raidin Pinin Periode 2017-2022 di Kabupaten Aceh Tenggara

Martha Beruh¹, Muhammad bin Abubakar², Muklir³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

*Corresponding Author: mabubakar@unimal.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan rotasi jabatan di Kabupaten Aceh Tenggara (pada masa pemerintahan Raidin Pinin periode 2017-2022). Pertanyaan utama yang ingin di jawab dalam studi ini adalah Bagaimana Kebijakan Rotasi Jabatan pada masa Pemerintahan Raidin Pinim Priode 2017-2022 dan yang kedua Apakah ada unsur Kepentingan Politik "*Political Interest*" terhadap Rotasi jabatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, prespektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktural. prespektif ini menempatkan hubungan kekuasaan agen dengan struktur dualitas, yaitu stara, dan saling mempengaruhi. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif pengumpulan datannya melalui tiga tahap antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi, temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan Rotasi jabatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara masa pemerintahan Raidin Pinim tersebut tidak serta merta upaya dalam memperhatikan pelayanan public namun ada unsur kepentingan politik. Kedua Rotasi Jabatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak lepas juga adanya kepentingan politik, namun bentuk daripada kepentingan politik yang penulis temukan di lapangan adalah kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan, rotasi jabatan di sebuah pemerintahan perlu dilakukan karena Rotasi Jabatan juga dapat bersifat positif. terutama dapat meningkatkan kinerja seseorang dan dapat mengatasi kejenuhan seseorang dalam bekerja. Saran yang ingin penulis sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah, jika rotasi mutasi yang ada di Aceh Tenggara dilakukan enam bulan sekali atau ada yang tiga bulan sekali ini sangat tidak baik, karena ini dapat menghambat kesempatan kepada seseorang untuk menunjukkan kinerjanya.

Keywords: Rotasi jabatan, Kepentingan Politik, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, kabupaten ini adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. kabupaten ini kerap melakukan praktik rotasi jabatan, terhadap pejabat esalon ii dan iii di pemerintahan kabupaten aceh tenggara, bupati aceh tenggara raidin pinim menyadari tindakan nya. rotasi, dan mutasi di pemerintahan tersebut adalah hal biasa, upaya itu dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan visi misi pemerintahan kabupaten aceh tenggara pernyataan itu kerap sampaikan oleh bupati aceh tenggara dalam sambutan pelantikan pejabat di aceh tenggara.

Pada 10 januari 2022 pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali melakukan totasi jabatan antara lain seperti bakri syahputra spd msi, sebelumnya menjabat kepala dinas pendidikan dan kebudayaa, kemudian di letakkan menjadi kepala dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten aceh tenggara. selanjutnya zulkifli spd mpd menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan aceh tenggara. sebelumnya menduduki jabatan kepala dinas pariwisata pemuda dan olahraga.

Raidin Pinim sepanjang pemerintah nya terindikasi adanya *political intresnst* atau politik kepentingan bukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hasil penelitian awal penulis tersebut dapat di buktikan, dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat dan tokoh politik yang ada di aceh tenggara, seperti wawancara penulis dengan bpk jumarin sopi, mantan ketua partai PPP Aceh Tenggara pada 06 Juni 2022, dirinya mengatakan, dalam pemerintahan kabupaten aceh tenggara tersebut terlalu banyak kepentingan politik timses yang harus di penuhi:

" rotasi dan mutasi itu, hanya untuk memenuhi janji politiknya kepada Tim 11 yang dia bentuk, karena selama ia (Raidin Pinim) menjabat tidak ada solusi untuk untuk mensejahterakan tim ses nya maka caranya dibuat seperti itu, kalo adalannya (Raidin Pinim) untuk meningkatkan pelayanan, saya rasa itu omong kososog"

Penjelasan diatas merupakan hasil wawancara penulis dengan bapak Jumarin Sopi yang merupakan tokoh politik kabupaten Aceh Tenggara maka dari itu sesuai dengan fenomena yang penulis jelaskan di atas. Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis sendiri yaitu, fokus Penelitian yang lebih pada Analisis Rotasi Kerja Pegawai dalam Menunjang Kualitas Layanan, sedangkan Fokus penelitian Penulis sendiri yaitu yaitu meneliti tentang kebijakan Rotasi Jabatan Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Masa Pemerintahan Raidin Pinim Priode 2017-2022 fokus penelitian Penulis sendiri lebih pada kebijakan Rotasi Jabatan.

Tabel 1.1
Jumlah Birokrasi yang di Rotasi di lingkungan Pemerintahan Aceh Tenggara 2022

No	Nama	Jabatan Sebelumnya	Jabatan Sekarang
1	Drs Zulkifli MPd	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora)	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
2	Bakri Saputra Spd MSI	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)	Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora)
3	Ramisin SE		Kasat POL PP dan WH Kabupaten Aceh Tenggara
4	Rahmad Fadli, S. STP., SI	Kasat POL PP dan WH Kabupaten Aceh Tenggara	Kepala Dinas Desperindag Aceh Tenggara
5	Firman Desky, S.STP., M.AP	Kepala Bagian Pemerintahan pada daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara
6	Fitriaty, S.STP	Kepala Bagian Organisasi dan tata laksanakan pada secretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	PJ. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara
7	Budi Afrizal, SKM, MKM	Sekretaris pada Rumah sakit umum, Daerah H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara	PJ. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Sumber: Web Pemkab Aceh Tenggara (<https://acehtenggarakab.go.id/>)

Landasan Teori

Dari pandangan para ahli dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku, Reformasi Birokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemerintahan daerah di Indonesia sering Melakukan Reformasi Birokrasi, Melalui Rotasi, Mutasi, Promosi jabatan itu merupakan salah satu Bentuk Reformasi Birokrasi, dalam Penulisan Penelitian Ilmiah ini saya Martha Beruh ingin meneliti tentang Reformasi Birokrasi Hubungan antara Rotasi Jabatan dan Pelayanan Publik. Hasibuan (2003) Membagi dasar Rotasi Jabatan menjadi tiga landasan pelaksanaan, antara lain:

1. *Merit System*, yaitu perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif dan hasil prestasi kerjanya. Sistem ini termasuk dasar Rotasi Jabatan yang baik karena dapat meningkatkan semangat dan disiplin karyawan sehingga produktivitasnya meningkat.
2. *Seniority System*, yaitu perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia dan pengalaman kerja dari jabatan yang bersangkutan. Sistem ini tidak objektif karena kecakapan orang yang dipindahkan didasarkan pada senioritas dan belum tentu mampu memangku jabatan yang baru.
3. *Spoil System*, yaitu perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan kekeluargaan, sistem ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka.

Kepentingan umum biasanya dilawankan dengan istilah kepentingan pribadi/perusahaan yang memiliki orientasi yang berbeda. Pengertian kepentingan umum yang dikemukakan oleh Huybers adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut semua sarana umum bagi berjalannya kehidupan yang beradab. Dari Penjelasan diatas dapat di tarik menjadi sebuah kesimpulan Kepentingan Politik adalah untuk menyambut kesejahteraan sekelompok orang sehingga mengorbankan kepentingan orang banyak, karena Politik kepentingan selalu ada di setiap instansi pemerintahan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian deskriptif mengenai kata-kata lisan ataupun tulisan, Pendekatan ini langsung diarahkan pada individu-individu dan kelompok masyarakat dimana mereka berada secara *holistic* dan tidak mereduksi aspek tertentu. Pendekatan ini melihat aspek penelitian sebagai bagian dari keseluruhan gejala yang diamata. Analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran konperhensif dan mendalam tentang Pengaruh Rotasi Birokrasi terhadap Pelayanan Publik di Aceh

Tenggara. Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian

Rotasi Jabatan adalah hal yang biasa, rotasi jabatan salah satu bentuk daripada reformasi birokrasi dalam sebuah pemerintahan tujuan dari pelaksanaan Rotasi Jabatan pada intinya untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi efektivitas kerja dalam suatu organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan dapat diperhatikan rotasi jabatan maka tujuan umum dilaksanakannya hal tersebut adalah untuk menciptakan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi. Adapun dasar-dasar dari rotasi jabatan adalah *Merit System*, *Sniority System*, dan *Spoil Syastem* Menurut Hasibuan, Merit System yaitu perpindahan jabatan berdasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah dan objektif, sedangkan Sniority System, yaitu perpindahan jabatan yang didasari atas ladasan masa kerja, sedangkan Spoil System, perpindahan jabatan yang di dasaekan atas landasan kekeluargaan.

Dalam kesempatan ini penulis mewawancari bapak Bukhari selaku wakil Bupati Aceh Tenggara priode 2017-2022, untuk menjelaskan Bagaimana Rotasi Birokrasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, dalam kesempatan ini beliau menyatakan bahwa ada beberapa hal penting memang harus melakukan rotasi dan mutasi di lingkaran pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara ini, yang pertama kalau kita lihat PNS ini kan ada jenjang di situlah nilai, Yang perlu dipahami rotasi yang dilakukan ini sesuai dengan kebutuhan structural organisasi pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, Selama dinas perubahan kinerja ketika mereka sudah lama diletakkan di dinas itu awalnya memang kinerja mereka bagus tapi kelamaan-kelamaan juga menurun inilah perlunya melakukan rotasi karena kebosanan juga mempengaruhi organisasi di pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil wawancara diatas bersama bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwa rotasi dan mutasi di lingkaran pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara harus dilakukan hal tersebut dilakukan adalah untuk meningkatkan kinerja di dalam pemerintahan, rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara selama ini adalah upaya mencapai good governance atau pemerintahan yang baik di Kabupaten Aceh Tenggara. Upaya-upaya rotasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kreativitas kinerja birokrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil wawancara bersama Bapak Drs. Sudirman, MPd selaku Asisten III Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan Rotasi yang dilakukan di pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah untuk meningkatkan kinerja daerah dan juga untuk mewujudkan visi dan misi bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan juga meningkatkan pelayanan publik rotasi birokrasi atau rotasi jabatan dalam pemerintahan sangat perlu dilakukan terutama untuk memenuhi struktur alat pemerintahan dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Rotasi yang sedang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan melalui Prosedur, Rotasi tersebut dilakukan melalui Penilaian, dan Evaluasi kinerja setiap dinas, Selain itu dapat diamati rotasi jabatan dilakukan atas dasar turunnya peningkatan kinerja di setiap instansi maka rotasi jabatan sangat berhubungan dengan pelayanan publik di sebuah pemerintahan karena setiap pergantian dinas indeks kerja keras dari orang yang diganti tersebut berbeda-beda sehingga dapat disimpulkan rotasi jabatan perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mereformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan terkait bagaimana hubungan Rotasi Birokrasi yang terjadi di Aceh Tenggara pada masa pemerintahan Raden pinin periode 2017-2022 hasilnya dapat disimpulkan bahwa Rotasi Birokrasi dengan pelayanan publik tidak dapat dilepaskan di Aceh Tenggara karena selama ini mereka melakukan rotasi di setiap instansi di setiap dinas-dinas yang di Aceh Tenggara adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bagus karena hasil dari wawancara penulis dengan wakil bupati dan salon III dan kepala BKP SDM Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa ada perubahan mendasar ketika seseorang kepala dinas tersebut di letakkan pada tempat yang baru semangat dan kreativitasnya meningkat namun setelah beberapa bulan ataupun beberapa tahun kinerjanya akan berkurang karena efek dari jenuh seseorang, baik itu dipengaruhi internalnya dan eksternalnya maka dari itulah inisiatif dari pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan Rotasi Birokrasi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih dan juga untuk Mewujudkan pelayanan publik yang baik di Kabupaten Aceh Tenggara dan tidak luput pula untuk mewujudkan visi misi pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kepentingan Politik "*Political Interest*" terhadap Rotasi jabatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara

Menurut Husnul Abdul politik adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Sedangkan Kepentingan adalah istilah untuk menyebut [kesejahteraan](#) masyarakat umum atau kesejahteraan bersama. Kepentingan umum biasanya dilawankan dengan istilah kepentingan pribadi. Dari penjelasan diatas dapat di tarik menjadi sebuah kesimpulan bahwa Kepentingan Politik memiliki macam-macam bentuk. Kepentingan kelompok, Partai Politik, Kelompok organisasi dan kepentingan Pribadi merupakan bentuk dari Kepentingan Politik atau *Political Interest*, untuk menjawab Apakah ada unsur kepentingan Politik terhadap Rotasi Jabatan yang terjadi di kabupaten Aceh Tenggara diatas sesuai dengan menjawab rumus masalah penulis, dalam kesempatan ini penulis melakukan wawancara bersama bapak Dr. Ridwan Syah, M.A salah satu Akademisi Aceh tenggara yang kerap mengamati kebijakan dan implementasi kebijakan yang di lakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam kesempatan tersebut, beliau mengatakan bahwa rotasi jabatan yang ada di Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Raiden pinim saat ini apakah bagaimana dengan kaitannya dengan pelayanan publik saya pikir pelayanan publik di Aceh Tenggara ini sejak beliau memimpin tidak ada peningkatannya. Tidak ada peningkatan pelayanan publik terkait upaya-upaya rotasi yang dilakukan oleh Bupati itu, Sebenarnya rotasi jabatan yang ada di Aceh Tenggara ini tidak lagi mendekati politik kepentingan yang bersifat Kelompok contohnya seperti menempatkan tim tesnya untuk menjadi kepala dinas itu tidak ada, namun sejauh ini yang saya lihat lebih kepada kepentingan Peribadi untuk mendapatkan uang artinya siapa yang ada uang yang bisa membayar baik itu kawan politiknya baik itu lawan politiknya di masa lalu tetap juga dijadikan sebagai kepala dinas. Karena saya perhatikan 2 tahun terakhir ini tidak lagi

diperhatikan siapa itu lawan politiknya dan siapa itu kawan politiknya, jadi persoalan terkait peletakan sebagai kepala dinas bahkan sebagai camat sekam pokoknya seperti penyelenggara pelayanan publik lah di Aceh Tenggara ini tidak lagi dilihat di unsur itu tapi lebih dominan persoalannya adalah siapa yang ada uang itu yang menjadi kepala dinas namun berapa jumlah uangnya ini kan sudah menjadi rahasia, jumlahnya secara pasti saya tidak mengetahui tapi yang jelas informasi yang saya terima dari teman-teman seperti itu siapa yang ada uang ya dijadikan sebagai kepala dinas.

Hasil wawancara penulis dengan bersama bapak Dr. Ridwan Syah, M.A di atas dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan bahwa apakah ada unsur kepentingan politik terhadap rotasi jabatan yang dilakukan oleh Raiden pinin di Kabupaten Aceh Tenggara jelas sebenarnya ada unsur kepentingan politik dalam rotasi jabatan tersebut tidak dapat dilepaskan namun bentuk daripada kepentingan politiknya lebih kepada kepentingan pribadi, seperti yang dijelaskan oleh informan di atas jika dikatakan rotasi jabatan di Aceh Tenggara saat ini kepentingan kelompok tidak bisa dipastikan karena sejauh ini yang diletakkan di kepala dinas di Aceh Tenggara ada juga bukan daripada teman-teman politiknya pada saat Pilkada yang lalu tetapi, dapat dipastikan kepentingan rotasi jabatan yang ada di Aceh Tenggara jelas kepentingan pribadi yaitu untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Punils juga melakukan wawancara Bersama Reza Eka Patra Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aceh Tenggara, Beliau Mengatakan bahwa rotasi jabatan di Aceh Tenggara ini untuk kepentingan pribadi ada juga tetapi ada juga kepentingan keluarga karena kenapa banyak adik-adik dan saudara-saudara dekat dia itu tidak dimutasi dan tidak dirotasi bahkan sampai sekarang masih menjabat di sebuah instansi di Kabupaten Aceh Tenggara, kalau dikatakan kelompok times saya pikir nggak ada lagi karena banyak juga yang bukan timesnya dulu menjadi kepala dinas. Jangan heran di Aceh Tenggara ini PNS main ke politik itu kan bukan rahasia umum lagi, memang sudah menjadi hal biasa jadi walaupun tidak terdaftar di partai politik ya Kita kan bisa baca siapa-siapa saja yang kelompok ASN ini yang mendukung secara politik tertutup, Yang jelas kalau ada uang bisa menjadi kepala dinas di sini Itu bukan lagi rahasia umum itu semua orang sudah mengetahui hal-hal seperti itu, Kalau dikatakan rotasi jabatan di Aceh Tenggara ini ada kepentingan politik Menurut saya itu yang paling kelihatan, karena selama ini pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara melakukan rotasi jabatan itu sesuka hatinya, karena banyak sebagian, baik itu di tingkat kecamatan di tingkat kabag dan juga di tingkat kepala dinas di Aceh Tenggara ini bahkan ada yang dirotasi itu belum sampai 6 bulan saja sudah di rotasi, di situlah sebenarnya justru saya melihat ada politik kepentingannya mengumpulkan pundi-pundi uang, karena rotasi jabatan di Aceh Tenggara selama ini persoalan ada uang itu bisa dikatakan bukan lagi rahasia umum. Jadi kalau dikaitkan dengan pelayanan publik yang jelas pelayanan publik di Aceh Tenggara saat ini semakin merosot coba lihat di dinas pendudukan pengurusan KTP masyarakat banyak yang mengeluh .

Hasil wawancara bersama Reza Eka Patra Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aceh Tenggara, di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa berbicara masalah rotasi jabatan di sebuah pemerintahan terutama yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini tidak luput juga dengan kepentingan politik ataupun *political interest* namun yang perlu dipahami adalah kepentingan yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda, namun terkhusus yang ada di Aceh Tenggara dapat dilihat dari wawancara kedua informan penulis menunjukkan bahwa kepentingan politik terhadap rotasi jabatan di Aceh Tenggara kerap terjadi dan kepentingan tersebut berwujud kepentingan pribadi, mengumpulkan pundi-pundi uang karena sesuai dengan yang sudah disampaikan kronologi rekrutmen di aceh tenggara terhadap rotasi jabatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Pemuda Kabupaten Aceh Tenggara tersebut dapat disimpulkan bahwa rotasi jabatan yang terjadi di Aceh Tenggara rentan terjadinya, rotasi jabatan tersebut juga dipengaruhi atas dasar politik kepentingan, seperti yang dijelaskan oleh informan di atas politik kepentingan yang berkembang pada jabatan rotasi jabatan di Aceh Tenggara jelas adalah kepentingan pribadi, dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa rotasi jabatan di Aceh Tenggara ada unsur politik kepentingan, dari jawaban semua informan di atas politik bentuk daripada politik kepentingan tersebut adalah politik kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan, karena melihat struktur yang ada di pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara saat ini dan jabatan dan orang-orang yang dirotasi terlihat bukan lagi diletakkan adalah orang-orang mereka atau times mereka pada saat kampanye dulu, dari hasil wawancara penulis menunjukkan siapa yang punya uang itulah yang akan menjadi baik itu kepala dinas menjadi camat dan menjadi posisi lainnya.

Pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara sering melakukan Rotasi Jabatan dengan alasan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan termasuk untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat agar tetap baik, hasil penelitian penulis dengan melakukan Observasi, mengamati dan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian penulis, hasil dari wawancara penulis dari berbagai pihak menunjukkan bahwa Rotasi yang dilakukan pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak serta merta dalam mewujudkan pelayanan public di Aceh Tenggara, Alasan mendasar Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara tersebut melakukan Rotasi jabatan tidak semuanya di pengaru Kinerja yang mulai menurun sehingga Rotasi jabatan menjadi solusi agar pelayanan kepada masyarakat terus terjaga, penurunan tersebut adalah efek dari kebosanan kerja, karena Pada saat pertama seorang pejabat itu di letakan pada posisi yang lain dapat mengubah semangat kerjanya sehingga pelayanan di setiap instansi tetap terjaga, selain dari itu ada juga di pengaruhi karena kepentingan politik.

Rotasi jabatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara dapat di pastikan tidak serta merta melanggar *Merit System*, untuk memehami *Merit Sistem* adalah yaitu perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif dan hasil prestasi kerjanya. Bentuk dari merit system yang di langgara adalah, macetnya laporan setiap minggu dan laporan bulanan, mekanisme Rotasi Jabatan dalam pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara pertama melakukan evaluasi, sebelum melakukan rotasi kepada bawahan, BKPSDM bersama pimpinan baik itu sekda wakil bupati dan bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas yang ada di Aceh Tenggara, Evaluasi tersebut di selenggarakan enaam Bulan sekali, Setahun Sekali hingga dua tahun sekali, namun selain melakukan evaluasi Bupati beserta Sekretaris daerah akan melakukan Rotasi dan Mutasi jika mendapatkan laporan yang tidak baik dari unsur masyarakat jika benar-benar terbukti, alasan mendasar mengapa terjadinya melanggar Sistem Merit dapat di

pengaruhi dari internal mereka sendiri, baik itu karena kebosanan dan lain-lain, berangkat dari itulah Bupati dan jajaran melakukan Rotasi, Mutasi, dan Promosi di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, karena dapat di pastikan jika kepala dinas melanggar Merit system dapat di pastikan menghambat pelayanan kepada masyarakat, sehingga mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara dapat terhambat, namu dari hasil penelitian penulis dilapangan menunjukan rotasi jabatan yang terjadi di kabupaten aceh tenggara tidak serta merta karena melanggar system merit tetapi ada unsur kepentingan politik peribadi

Kepentingan kelompok, Partai Politik, Kelompok organisasi dan kepentingan Pribadi merupakan bentuk dari Kepentingan Politik atau *Political Interest*, untuk menjawab Apakah ada unsur kepentingan Politik terhadap Rotasi Jabatan yang terjadi di kabupaten Aceh Tenggara. rotasi jabatan yang dilakukan oleh Raiden pinin di Kabupaten Aceh Tenggara jelas sebenarnya ada, unsur kepentingan politik dalam rotasi jabatan tersebut tidak dapat dilepaskan namun bentuk daripada kepentingan politiknya lebih kepada kepentingan pribadi.

Berdasarkan Observasi, pengamatan yang penulis lakukan dan hasil wawancara Penulis dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitaian di lapangan menunjukan, Rotasi Jabatan di sebuah pemerintahan terutama yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini tidak luput juga dengan kepentingan politik ataupun *political interest* namun yang perlu dipahami adalah kepentingan yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda, namun terkhusus yang ada di Aceh Tenggara dapat dilihat dari wawancara penulis dengan beberapa informan menunjukkan bahwa kepentingan politik terhadap Rotasi Birokrasi di Aceh Tenggara kerap terjadi dan kepentingan tersebut berwujud kepentingan pribadi, mengumpulkan pundi-pundi uang. Rotasi Jabatan yang terjadi di Aceh Tenggara kerap dengan adanya kepentingan politik atau *Political Interest*, tetapi wujud daripada kepentingan politik tersebut adalah kepentingan pribadi, untuk mencari keuntungan pribadi, hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai pernyataan informan penulis, selain daripada penjelasan informan tersebut.

Pada saat melakukan observasi di lapangan penulis mendapatkan surat teguran, dari (KASN) surat tersebut di tunjukkan kepada bupati Aceh Tenggara (selaku pejabat pembina kepegawaian) surat tersebut berisi agar Bupati Aceh Tenggara melakukan evaluasi ulang terhadap salah satu kepala dinas yang ada di Aceh Tenggara yang tidak terbukti melanggar sistem mariat di lingkungan Kabupaten atau Negara. Kepentingan politik terhadap rotasi, mutasi, dan promosi di lingkaran pemerintahan bukanlah hal yang lumrah, tetapi kepentingan politik tersebut berbeda-beda namun yang pasti dari hasil observasi wawancara penulis di lapangan menunjukkan bahwa rotasi jabatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara selama pemerintahan Raidin Pinim tidak terlepas juga adanya kepentingan politik kepentingan politik tersebut ialah kepentingan politik pribadi untuk mendapatkan keuntungan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian rotasi jabatan di Aceh Tenggara pada masa Pemerintahan Raidin Pinim Priode 2017-2022, tersebut tidak serta merta upaya dalam memperhatikan pelayanan publik, berdasarkan hasil penelitian penulis dalam mengumpulkan data penulis menemukan sebuah surat dari KASN dengan nomor B-2308/JP.01/06/2022 dalam hal Rekomendasi atas pelanggaran system merit di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang di tunjukan kepada Bupati Aceh Tenggara agar melakukan Evaluasi kepada salah satu Pejabat di lingkungan pemerintahan tersebut, adapun mekanisme rotasi jabatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara atas dasar hasil dari evaluasi yang dilakukan jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, evaluasi itu dilakukan oleh BKPSDM Sekda Wakil Bupati dan Bupati, rotasi jabatan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara sebagian memang sudah mengikuti prosedur yang di tetapkan oleh KASN, Alasan yang mendasar pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kerap melakukan rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah karena kerap terjadinya pelanggaran sistem merit, Pelanggaran tersebut Berbentuk lambatnya laporan mingguan, dan bulanan. pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara melakukan evaluasi setiap dinas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan rotasi dan mutasi di lingkaran Kabupaten Aceh Tenggara, Rotasi Jabatan yang terjadi di kabupaten Aceh Tenggara sebagian dapat dikatakan memang murni adanya pelanggaran system merit tidak serta merta juga atas pelanggaran tersebut.

Kepentingan Politik "*Political Interest*" terhadap Rotasi Jabatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara. Berbicara masalah Rotasi jabatan merupakan salah satu bentuk daripada reformasi birokrasi yang kerap dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berbicara masalah pemerintahan baik itu dalam melakukan Rotasi Jabatan di lingkungan pemerintahan daerah tentu tidak luput pula dengan namanya kepentingan politik, dari hasil observasi, dan wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan pada saat melakukan penelitian menjawab bahwa rotasi jabatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak lepas juga adanya kepentingan politik, namun bentuk daripada kepentingan politik yang penulis temukan di lapangan adalah kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan, Rotasi Birokrasi di sebuah pemerintahan perlu dilakukan karena Rotasi Birokrasi juga dapat bersifat positif. terutama dapat meningkatkan kinerja seseorang dan dapat mengatasi kejenuhan seseorang dalam bekerja.

Seharusnya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan rotasi mutasi yang ada di Aceh Tenggara dilakukan enam bulan sekali atau ada yang tiga bulan sekali ini sangat tidak baik, karena ini dapat menghambat kesempatan kepada seseorang untuk menunjukkan kinerjanya, menurut saya rotasi yang ada di Aceh Tenggara jangan terlalu cepat dilakukan berikan kesempatan seseorang untuk menunjukkan kinerjanya, karena ketika seseorang hanya diberikan tiga atau 6 bulan dengan waktu yang begitu singkat saya rasa sulit bagiseseorang untuk menunjukkan hasil kinerjanya dalam memimpin sebuah dinas.

Daftar Pustaka

- Anselm & Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (terj)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdullah Syukur, 1998, *Budaya Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Makalah Seminar Nasional II AIPI, Yogyakarta 6-7 September 1989, dirangkum dalam Akhmad Setiawan, Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Dwiyanto. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM
- Albrow, M. (1996). *Birokrasi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, hal 22
- Bitner, M. J. dan Zeithaml, V. A., 2003, *Service Marketing (3rd ed.)*, Tata McGraw Hill, New Delhi
- Bambang Wahyudi. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Penerbit SULITA, Bandung
- Dewandaru sigit. (2013). *Pemanfaatan Aplikasi e-office untuk mendukung reformasi: Bandung*
- Fountain, J. E. (2007). *Bureaucratic Reform and E-Government in the United States: An Institutional Perspective. A Pre-publication Version of a Chapter to be Printed Andrew Chadwick and Philip N. Howard (Eds). The Handbook of Internet Politics*. New York: Routledge.
- Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta: Grasindo
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Personalialia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kaufman, H. (2011). Major Players: Bureaucracies in American Government. *Public Administration Review*,
- Leo Agustino, 2008, "Dasar-Dasar Kebijakan Publik" Bandung: Afabeta
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr, 2009, *metode penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakaya
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- T. Ndraha, Kybernology, 2003 *Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Peter Salim, 1994, *Advanced English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Pustaka Pelajar.),
- Thomas R Dhey, 1995, *Understanding Public Policy* New Jersey: Prentice Hall
- Pawiro, 2007, *penelitian komunikasi kualitatif*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Abbas, F., dan Sadat, A Dengan Judul, "Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi, Jurnal, <https://jurnal-umbuton.ac.id>
- Errica Dwi Tanti, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah "Pelaksanaan Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan)." Jurnal <https://media.neliti.com/>
- Josef kurniawan Kairupan, "Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara" jurnal <https://media.neliti.com>
- Katerina Bataha yang berjudul "DAMPAK KEBIJAKAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DALAM PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe), Jurnal Volume II. No. 4. Tahun 2013 <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- M. Fachri Adnan, "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik", <https://adoc.pub>
- Rukiyah, dan Ageng Saraswati, Analisis Rotasi Kerja Pegawai Perpustakaan Dalam Menunjang Layanan Di Upt Perpustakaan Universitas Pgris Semarang, jurnal <https://media.neliti.com>
- Sabastiana Desi, Sugeng Rusmiwari "Orientasi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik" jurnal www.publikasi.unitri.ac.id, ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 3 (2016)
- Telly Muriandy dan Victor S. Ruhunlela dengan judul "Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar" Jurnal Public Policy, Vol. 2, No. 1, Maret 2021
- Yusriadi, dan Misnawati adapun Judul Penelitiannya adalah "Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)" Jurnal / ojs.unm.ac.id/index.php Volume 7 Nomor 2 Juli - Desember 2017. Hal 99-108
- <http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/reformasi-birokrasi>
- <https://nasionalnews.co/bupati-aceh-tenggara-rotasi-dan-lantik-dua-pejabat-eselon-ii/>
- <https://acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/pemkab/wabup-lantik-16-pejabat-eselon-iii-dan-iv>
- <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/11/bupati-aceh-tenggara-rotasi-kadisdikbud-dan-disparpora>
- <https://acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/pemkab/wabup-lantik-16-pejabat-eselon-iii-dan-iv>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/02/19280771/kemendagri-minta-pemda-selalu-berkomitmen-lakukan-reformasi-birokrasi?page=all>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi>
- jurnal media meliti.com
- <https://www.kemenkopmk.go.id/RB/profil>
- <https://www.badanpusatstatistik.kabupatenacehtenggara>